

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PILOT PROJECT PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009**

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejauh ini masih mengalami berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Program-program yang dibuat nyatanya masih mengambang dan tidak ada hasil yang signifikan yaitu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin membahas bagaimana pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan program-program yang telah di rencanakan berdasarkan SKPD Pemerintah Kabupaten Sleman.

Karena pilot project penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Prambanan merupakan proyek ujicoba penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya mengentaskan masyarakat Sleman dari jurang-jurang kemiskinan, dalam hal ini pilot project penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan SKPD yang telah dibuat sehingga memiliki koordinasi dalam pelaksanaannya.

Pada bab ini akan diuraikan secara jelas tentang bagaimana proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman di Desa Margoluwih, adapun variable-variabel yang berperan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:



## **1. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**

Melihat semakin urgennya permasalahan Kemiskinan di Indonesia maka melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 juncto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 maka dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk lebih mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberadaan TKPK diharapkan melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tugas dari TKPK adalah melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara lain P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), P3DT (Program

Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), dan program pembangunan sektoral telah berhasil memperkecil dampak krisis ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

TKPK bertugas untuk melakukan langkah-langkah nyata guna mempercepat upaya pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, TKPK menyelenggarakan fungsi:

- Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Pusat dan di Daerah.
- Meningkatkan responsivitas, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi lokal.
- Memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan perkembangan kondisi kemiskinan.

Menindak lanjuti PP No.54 Tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan SK Bupati No.181 Tahun 2006 tentang pembentukan Tim

kemiskinan di Kabupaten Sleman. Setelah terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sleman berinisiatif memaksimalkan kinerja TKPKD dengan membuat sebuah Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan yang di fokuskan di Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Prambanan kaeran wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dibanding Kecamatan-Kecamatan yang lain.

Dalam mekanisme pelaksanaan pilot project pananggulangan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah kemudian membentuk Tim Penanggulangan kemiskinan Kecamatan (TPK) guna mempermudah TKPKD dalam melaksanakan program-program yang telah di buat. Dan nantinya TPK Kecamatan ini bertugas mengkoordinasikan Desa-Desa yang memiliki angka kemiskinan tinggi guna penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar nantinya masyarakat-masyarakat miskin benar-benar di berdayaakan sehingga dapat membantu mereka untuk membuat suatu lapangan kerja dan nantinya diharapkan dapat melepaskan mereka dari jurang kemiskinan.

Selanjutnya untuk tingkat Desa di bentuklah Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa yang di bantu oleh para Dukuh agara proses implementasi program yang dilaksanakan tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan data dalam pelaksanaan dan penyaluran dana program. Untuk itu Desa-Desa yang di tunjuk

dalam laporan terhadap jalur-jalur TPK yang sudah di bentuk sehingga nantinya TPK Desa bertanggung jawab terhadap TPK Kecamatan dan TPK Kecamatan bertanggung jawab atas kinerja yang dilakukan TPK-TPK Desa terhadap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan selanjutnya TKPKD melakukan evaluasi apakah program penanggulangan kemiskinan di wilayah percobaan berhasil atau tidak untuk melakukan proses selanjutnya yaitu perbaikan kinerja aparat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sehingga nantinya diperiode berikutnya program-program pemberdayaan masyarakat dapat dimaksimalkan dengan baik.

Namun dalam pelaksanaanya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tidak ikut terjun kelapangan dalam hal pengawasan, yang dilakukan hanyalah meminta hasil laporan dari tim penanggulangan kemiskinan (TPK) Kecamatan Seyegan, sehingga terdapat jarak antara TKPKD dengan TPK Kecamatan maupun TPK Desa karena seharusnya TKPKD ikut terjun kelapangan dalam hal pengawasan dan mengevaluasi kinerja pelaksana program agar nantinya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan program dapat terpenuhi dan masalah-masalah yang ada dapat segera mendapat solusi karena TKPKD mewakili Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pembuat kebijakan dan program

## **2. Koordinasi Instansi-Instansi Pendukung**

Dinas-dinas yang mendukung dalam pilot project penanggulangan kemiskinan diharapkan saling berkoordinasi dengan TPK baik itu TPK Kecamatan maupun TPK Desa agar program-program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran karena TPK Desa lebih mengerti keadaan wilayah dan masyarakatnya sehingga mempermudah implementasi program di setiap pelaksanaannya. Oleh karena itu koordinasi antara instansi pendukung sangatlah di harapkan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

Sejauh ini berdasarkan pemaparan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada enam Dinas yang mendukung dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih yaitu: Dinas Nakeros KB, Kesehatan, P2KPM, Pertanian dan Kehutanan, Kimpraswilhub, Bappeda. Masing-masing Dinas ini di beri anggaran untuk membuat program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membangun masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan pengelolaan sumberdaya yang mereka miliki.

Strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SKPD) sangatlah berperan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dinas-dinas pendukung dalam pilot project penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih. Karena dari SKPD inilah dinas-dinas Pendukung memiliki acuan dalam proses kegiatan yang hendak mereka lakukan dan dinas-dinas pendukung diharapkan mampu mengembangkan program-

dilakukan dinas-dinas dalam proses penanggulanga kemiskinan, namun juga harus di dukung dengan dana yang mencukupi.<sup>42</sup>

Berikut ini bentuk kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi pendukung dalam pilot project penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih berdasarkan SKPD Kabupaten Sleman:

a. Dinas Pertanian

Melakukan Revitalisasi pertanian adapun kegiatan yang dilakukan yaitu:

- Penguatan pada sektor input pertanian berupa pemberian bibit, pupuk dan pestisida karena melihat sektor ini yang paling banyak di geluti masyarakat karena masyarakat Margoluwih lebih banyak bekerja sebagai petani.
- Diversifikasi produk pertanian berupa pengembangan teknologi dan pengembangan agribisnis pertanian (antisipasi pengurangan lahan pertanian dan degradasi lingkungan) karena dengan di dukung teknologi yang baik mampu membuat masyarakat meningkatkan produk pertanian dan agribisnis pertanian menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita ketahui bersamaan bahwa lahan-lahan pertanian semakin lama semakin sempit sehingga ketika lahan pertanian masih luas harus di optimalkan dengan maksimal.



### **c. Dinas Pariwisata**

Peran yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Margoluwih adalah dengan cara melakukan peningkatan sektor Pariwisata yaitu mengoptimalkan pengembangan Desa Wisata sebagai unit ekonomi pedesaan. Karena kita ketahui pada sekarang ini wisata desa merupakan salah satu wisata yang paling optimal dan di gemari wisatawan-wisawaan lokal maupun luar negeri karena faktor kejenuhan yang di timbulkan dari padatnya kota-kota besar sehingga membutuhkan suasana yang alami dan mampu memberikan kesan yang nyaman bagi wisatawan. Disinilah upaya yang sangat baik yang hendak di laksanakan oleh Dinas Pariwisata sehingga nantinya dengan dibentuknya Desa Wisata diharapkan masyarakat mampu menambah pendapatan mereka.

### **d. Dinas Pendidikan**

Dinas Pendidikan ingin melakukan Peningkatan kualitas SDM terhadap masyarakat Desa Margoluwih dengan melakukan dua upaya yaitu peningkatan pendidikan formal yaitu peningkatan angka partisipasi sekolah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Kemudian melakukan peningkatan pendidikan non formal di antaranya dengan melakukan pelatihan kepada usia produktif, bantuan teknis alat usaha, bantuan modal usaha, penguatan kelompok masyarakat produktif, dan pendidikan non formal ini juga bekerjasama

sepenuhnya di dukung dalam pelaksanaannya sehingga pendidikan yang di berikan lebih tepat guna.

e. Dinas Kesehatan

Peran Dinas Kesehatan yang di rencanakan dalam program ini adalah dengan cara melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dengan cara memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin, jaminan hidup masyarakat miskin, dan memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat miskin. Dengan adanya jaminan kesehatan yang di berikan kepada masyarakat miskin tentunya dapat memberi kenyamanan kepada masyarakat miskin tanpa harus takut memikirkan biaya saat berobat.

Namun dari hasil penelitian menunjukan bahwa pada pelaksanaannya tidak semua instansi bekerja dengan baik dan menjalankan program-program yang telah di buat dalam pengentasan kemiskinan di Desa Margoluwih. Selain itu kurangnya koordinasi yang dilakukan antara instansi pendukung dengan TPK yang dibuat tentunya dapat menimbulkan ketidak seriusan yang diperlihatkan oleh anggota-anggota TPK sehingga nantinya hasil yang didapat tidak sesuai harapan.

Dengan tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas pendukung dalam pelaksanaan program tentunya mempersulit TPK Kecamatan dalam melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, sehingga sulit untuk

diapresiasi oleh instansi lain karena TPK Kecamatan tidak diberi wewenang dalam

hal pengelolaan dana. Oleh karena itu bisa dikatakan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan sangat kacau dan tidak terkoordinir, baik itu yang dilakukan oleh pelaksana program maupun dinas-dinas pendukung.

Dinas-dinas pendukung lebih cenderung berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak tercipta suatu tim yang solit dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, karena kebijakan penanggulangan kemiskinan membutuhkan kinerja sebuah tim yang solit agar dapat mensukseskan program-program penanggulangan kemiskinan yang dibuat. Dinas-dinas pendukung maupun TPK Kecamatan adalah bagian dari tim dalam menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dan juga peran masyarakat sangat dibutuhkan agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan sesuai harapan dan hasil yang optimal.

### **3. Komitmen Dan Sikap Pejabat Pelaksana**

Komitmen yang ditunjukkan oleh pejabat pelaksana program penanggulangan kemiskinan pemerintah Kabupaten Sleman di tunjukkan melalui bagaimana proses-proses pelaksana program yang dilaksanakan apakah berhasil atau tidak. Dalam hal ini Pemerintah Desa Margoluwih dan Pemerintah Kecamatan Sleman harusnya solid dalam tim untuk melaksanakan program penanggulangan

kemiskinan. Koordinasi pun selalu dilakukan antara tim penanggulangan kemiskinan Kecamatan dengan tim penanggulangan kemiskinan Desa.

Selain itu, komitmen juga di tunjukan oleh pejabat pelaksana dengan cara memberikan pendamping-pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program dilapangan agar kegiatan yang dilakukan tidak melenceng dari rencana yang telah dibuat, hal ini akan membuat masyarakat tidak sulit untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pendampingan ini dilakukan karna minimnya pengetahuan masyarakat Desa Margoluwih, karena mayoritas penduduk miskin di Desa Margoluwih hanya mengecap pendidikan setaraf SD bahkan banyak masyarakat yang tidak pernah mengenyam pendidikan.

Namun berdasarkan hasil penelitian dan analisa kenyataan dilapangan terlihat bahwa pejabat pelaksana kurang siap dalam kontek pelaksanaan kegiatan, ini terlihat jelas bahwa masing-masing yang bertindak sebagai pendamping dilapangan tidak memiliki kualitas dalam artikata tim yang dipilih oleh Pemerintah Desa tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, tidak adanya laporan yang di buat oleh tim penanggulangan Desa atas dana program di terima, jadi tidak adanya transparasi data yang dilakukan Pemerintah Desa Margoluwih sehingga dana yang keluar tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Banyak sekali anggota yang tecatat di dalam SK tim penanggulangan

beranggapan bahwa pilot project penanggulangan kemiskinan ini merupakan pekerjaan sampingan karena mereka memiliki pekerjaan pokok di kantor Kecamatan, oleh karena itu person-person yang ada sering di ganti untuk mencapai hasil yang optimal. Anggota-anggota yang di pilih berasal dari luar anggota kantor Kecamatan, misalnya tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain-lain.

Ini menimbulkan permasalahan baru, karena kemampuan yang mereka miliki tidak sebanding dengan tanggung jawab yang di berikan kepada mereka sebagai pelaksana program, sehingga pelaksana program yang baru kurang memahami tugas yang di berikan kepada mereka. Selain itu biaya oprasional yang terbatas juga menyebabkan tidak konsistennya kinerja yang dilakukan oleh para anggota tim penanggulangan kemiskinan Kecamatan Seyegan dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.

Insentif memang ada di berikan namun kalo dikatakan cukup ya gak cukup kalo dikatakan kurang ya kurang, namun akir-akir ini sudah tidak ada insentif lagi, la wong ada insentif aja ogah-ogahan apalagi gak ada ya makin gak mau to mas. Apalagi person yang diangkat dari luar, lainhalnya kalo pegawai Kecamatan, la yang udah punya gaji pokok aja di kasih kerjaan tambahan namun tidak ada dana tambahan aja wegah, apalagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan pokok.<sup>43</sup>

Sistem guru dan murid masih berlaku dalam pelaksanaan program ini karena anggota-anggota pelaksana program yang ditunjuk harus di kejar-kejar dan

di beri arahan baru mereka bisa bekerja. Dari sini terlihat jelas bahwa aparat pelaksan tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan baik itu anggota-anggota yang telah di tunjuk dalam SK Camat maupun anggota-anggota baru yang di tunjuk secara langsung.

Oleh karena itu implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan bisa dikatakan belum berhasil dalam konteks pelaksanaannya karena pejabat maupun pelaksana program tidak memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.

## **B. Konteks pelaksanaan**

Pilot project Penanggulangan kemiskinan Desa Margoluwih merupakan upaya yang sangat baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengurangi angka kemiskinan, karna kita ketahu bersama bahwa program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mengatais masalah kemiskinan selalu terganjal masalah dalam implementasinya seperti salah sasaran dan juga kurangnya data yang falid dalam pemberian bantuan, selain itu program-program yang ditawarkan Pemerintah Pusat lebih bersifat sementara sehingga tidak optimal dalam mengurangi angka kemiskinan.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh

membutuhkan kerjasama yang baik antara pelaksana program dengan masyarakat sehingga dapat tercipta keselarasan dalam implementasi sehingga mampu mengorganisir kegiatan yang di rencanakan dan tercipta sebuah hasil yang optimal yaitu mengurangi angka kemiskinan. Selain itu dalam mengatasi masalah kemiskinan juga dibutuhkan peran dari sektor-sektor swasta maupun LSM yang ada agar pelaksanaan-pelaksanaan program yang di buat bisa terorganisir dengan baik.

### **1. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan**

Dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah merumuskan pelaksanaan program dibagi menjadi tiga klaster yaitu klaster pertama di kasih ikan dalam arti bahwa di sini yang di beri bantuan adalah masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak memiliki keterampilan, bantuan yang di berikan berupa bantuan perlindungan sosial seperti pemberian Raskin, PKH, BOS, BOSDA, JAMKESMAS, JAMKESOS, JPKM, Padat Karya, bantuan bibit dan lain-lain.

Kemudian klaster kedua di ajari mancing, yaitu pemberdayaan masyarakat dimana mereka diajari agar bisa mengelola potensi yang mereka miliki dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan skill dan di berikan bantuan modal, disini masyarakat yang di pilih adalah masyarakat miskin tapi memiliki kemampuan manajemen

. . . . .





menandakan bahwa tidak semua KK miskin mendapatkan Raskin. Kurangnya transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa menyebabkan proses implementasi penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih tidak berjalan sesuai hasil dan ada kesan bahwa terjadi penyelewengan dana yang dilakukan Pemerintah Desa karena kita ketahui bersama bahwa KK miskin di Desa Margoluwih adalah 734 KK sedangkan yang di beri bantuan raskin hanyalah 619KK. Dilihat dari data ini ada 115KK yang tidak mendapatkan bantuan Raskin. Inilah yang menjadi pertanyaan kepada Pemerintah Desa Margoluwih sebagai pihak pelaksana program kenapa terjadi ketidak merataan dalam pemberian raskin.

Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan. Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah Desa dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga

Selain itu dalam klaster ini program yang dilakukan yaitu berupa Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; (2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; (4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang mengurus dan kakak mengambil nama penerima adalah orang yang namanya tercantum di



program ini sebanyak 71 KK. Ini menandakan bahwa tidak semua KK miskin yang ada di Desa Margoluwih mendapatkan bantuan ini.

Tidak meratanya bantuan yang diberikan dalam program PKH dikarenakan kurangnya dana yang di gulirkan dalam pelaksanaan program ini sehingga banyak sekali masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam program PKH merasa kecewa oleh karena itu Pemerintah Desa berupaya bersikap adil dan memberikan penjelasan kepada masyarakat miskin kalau dana yang di gulirkan dalam program ini tidak sepenuhnya masyarakat miskin bisa menerima dan yang belum mendapatkan bantuan ini akan di beri pada periode berikutnya.<sup>45</sup>

**Tabel 3.1**

**Bantuan Dan Perlindungan Sosial Desa Margoluwih Tahun 2009**

No	Jenis Bantuan Pada Klaster I	Jumlah Penerima Bantun (KK)
1	Jeminan Kesehatan Sosial (JAMKESSOS)	747
2	Raskin	619
3	Program Keluarga Harapan	71
	Jumlah	1437

*Sumber data: Pemerintah Desa Margoluwih*

**b. Pemberdayaan Masyarakat**

Sesuai SKPD Kabupaten Sleman tahun 2005, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas pembangunan masyarakat dalam mengentaskan masyarakat

Kabupaten Sleman dari kemiskinan. Karena melalui sektor ini Pemerintah Daerah ingin mendidik masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan yang mereka hadapi karena jika masyarakat terus dimanjakan dengan bantuan-bantuan yang bersifat uang tunai atau sebagainya, tentunya akan membuat mental masyarakat menjadi buruk dan tidak mau bekerja kerana slalu mendapat bantuan dari Pemerinah. Pendidikan mental inilah yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan membuat program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi menganggur dan terlepas dari jurang kemiskinan.

Pada program pemberdayaan masyarakat, di Desa Margoluwih telah melaksanakan dua kegiatan yaitu dibidang jasa dan ternak. Pada bidang jasa Pemerintah Kabupaten Sleman melakkukan upaya-upaya untuk menunjang peningkatan hasil pertanian yaitu berupa pengadaan traktorisasi sehingga nantinya dapat mempermudah masyarakat dalam proses membajak di sawah mereka, dan program traktorisasi di bagi menjadi lima kelompok masyarakat yang beranggotakan 100 orang per kelompok dan nantinya setiap kelompok saling berkoordinasi dalam pemakaian traktor ini. Dana yang dikeluarkan untuk pengadaan traktor ini adalah sebesar Rp 100.000.000, dan traktor ini dapat digunakan petani dengan cara bergantian sehingga dapat mempermudah dan

.....



**Tabel 3.2**

**Program Pengadaan TraktorKube Sejahtera X Sembada 091**

No	Nama	jabatan
1	Sukiman	Ketua
2	Paiman	Sekretaris
3	Tukijo	Bendahara
4	Toni	Anggota
5	Tukidi	Anggota
6	Marioto	Anggota
7	yahdi	Anggota
8	Zubaidi	Anggota
9	suparjo	Anggota
10	ponijan	Anggota

*Sumber Data Pemerintah Desa Margoluwih*

**Tabel 3.3**

**Program Pengadaan Sapi TernakKube sejahtera X Sembada 093**

No	Nama	Jabatan
1	Sumadi	Ketua
2	Sugeng Harianto	Bendahara
3	Samsul Hadi	Sekretaris
4	Maryanto	Anggota
5	Hari Sutarjo	Anggota
6	Waryono	Anggota
7	Lebuh Rianto	Anggota
8	Junaidi	Anggota
9	Suparno	Anggota
10	Lestari	Anggota

*Sumber Data Pemerintah Desa Margoluwih*

### **c. Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil**

Pemberdayaan usaha kecil dan mikro memerlukan program yang komperhensif meliputi aspek pembinaan makro dan mikro. Aspek makro dengan menciptakan struktur industry dan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya usaha kecil. Sedangkan aspek mikro dilakukan melalui penataan kelembagaan dan manajemen bisnis dari usaha kecil dan mikro. Pembinaan kelembagaan dilakukan melalui penguatan sentra-sentra usaha, promosi program keterkaitan antara perusahaan kecil dan mikro dengan perusahaan besar. Sedangkan pembinaan manajemen usaha terkait dengan program peningkatan mutu produk, pemasaran dan sebagainya.

Agar pemberdayaan usaha kecil dan mikro dapat epektif, maka perlu dilakukan terlebih dahulu eksternal audit pada tingkat makro (industry level) dari hulu sampai hilir terhadap masing-masing sektor usaha sekala kecil dan mikro. Audit ini dapat dilakukan untuk melacak dan mengidentifikasi titik-titik rantai nilai mana saja pada suatu sektor industri tertentu yang cocok digarap usaha kecil. Se jauh ini, Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang telah dilaksanakan di Desa Margoluwih di tujukan kepada wanita rawan sosial yang ada di Desa Margoluwih.

Ada dua kelompok yang di bentuk dan beranggotakan 30 orang. Bantuan ini berupa pemberian modal untuk jual beli dan modal yang di berikan sebesar Rp 1.000.000 tiap anggota kelompok dan di potong Rp 250.000 untuk simpan pínjam sehingga masing-masing anggota mendapatkan Rp 750.000. bantuan modal usaha yang diberikan tentunya dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka, karena Desa Margoluwih berdekatan dengan pasar induk Godean, dan tentunya bantuan modal ini dapat mereka gunakan untuk berjualan dipasar. Jadi dalam pilot project penanggulangan kemiskinan ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya membantu masyarakat di semua sektor yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>46</sup>

Sejauh ini, program pemberdayaan usaha mikro dan kecil merupakan program yang mendapat proporsi paling sedikit di banding pada kalster-klaster yang lain, ini terlihat dengan sedikitnya program yang dilaksanakan di Desa Margoluwih, seharusnya program ini jika di optimalkan akan menambah lapangan kerja bagi masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin tidak lagi mengganggur.

Belum adanya upaya pembinaan yang dilakukan terhadap usaha mikro untuk bekerja sama pada sektor industri dalam pembuatan produk-produk rumah tangga membuat peluang yang ada menjadi sia-sia, dan jika indutri rumah tangga dapat di kelola dengan baik maka akan tercipta sebuah lapangan kerja yang baik bagi masyarakat tentunya di dukung dengan modal usaha. Melalui sektor inilah diharapkan peluang usaha bagi masyarakat miskin dapat tercipta, namun dalam pelaksanaannya pemberdayaan usaha mikro dan kecil ini tidak di optimalkan dengan maksimal.

---

**Tabel 3.4**

**Program Simpan Pinjam Keluarga Sejahtera**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Siti maimunah	Ketua
2	jumiati	Bendahara
3	Sumilah	Sekretaris
4	Sri lestari	Anggota
5	Sarinem	Anggota
6	Siti Asiah	Anggota
7	Nita Tri Apsari	Anggota
8	Poniyem	Anggota
9	Wagirah	Anggota
10	Murtiyem	Anggota

*Sumber Data Pemerintah Desa Margoluwih*

**2. Dana Program**

Pembuatan suatu program yang dilakukan oleh instansi maupun perorangan haruslah di dukung dengan kekuatan dana yang mencukupi, hal ini dikarenakan dana merupakan aspek terpenting dalam melaksanakan kegiatan program. Program-program yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan jika tidak ada dana yang di siapkan. Untuk itu ketika Pemerintah Kabupaten Sleman membuat sebuah program penanggulangan kemiskinan, tentunya sudah ada dukungan dana yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sleman agar proses pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan dana sebesar Rp 5.424.570.000 untuk program penanggulangan kemiskinan di

kekurangan-kekurangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan program tersebut. Kemudian pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menggulirkan dana program penanggulanga kemiskinan di Kecamatan Seyegan agar program yang telah di laksanakan pada tahun sebelumnya dapat di teruskan dan memperoleh hasil yang maksimal, namun dana yang guliirkan tidak sebanyak tahun 2008, tercatat dana yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di

Tabel 3.5

## Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Seyegan Tahun 2009

No	Program/kegiatan	Lokasi (Desa)	Sasaran (orang)			Vol Hasil Kegiatan	Sumber Dana	SKPD/Institusi Terkait	Jumlah dana/angggaran (Rp)
			Gakin	Non Gakin	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>Kluster 1</b>								
	<b>Bantuan dan perlindungan sosial</b>								
	<b>Kelompok sasaran</b>								
	1. Program Keluarga Harapan	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	492		492		APBN	NAKERSOSKB	191.696.000
	2. Bantuan Beras Miskin	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	3214		3214	48.210 Kg	APBN	NAKERSOSKB	77.136.000
	3. Bantuan Paket Lebaran	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	600		600		UPK PPK,BKM, KEC	BAPPEDA	15.000.000
	4. Bantuan Paket Susu Anak SD	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	400		400		UPK PPK	BAPPEDA	10.000.000
	5. Bedah Rumah	Margokaton	1		1	1 rumah	APBD Kab	KIMPRASWIL	20.000.000
	6. Bantuan Semen Untuk Lantainisasi	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	74		74	74 rumah	APBD Kab	KIMPRASWIL	320.000.000
	7. Padat Karya Produktif	Margoagung	88		88		APBN	NAKERSOSKB	200.000.000
	8. Bantuan Modal Usaha	Margomulyo, Margodadi	30		30	30 usaha dagang/IRT	APBD Kab	NAKERSOSKB	21.000.000

WRSE								
9. Bantuan Susu Balita	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	30		30		APBN	DINKES	27.000.000
10. Bantuan Susu Bumil	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	10		10		APBN	DINKES	4.500.000
11. Bantuan Makanan Tambahan anak	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	396		396		APBD Kab	DINKES	
12. Bantuan Makanan Tambahan Bumil	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	51		51		APBD Kab	DINKES	
13. Bantuan Oprasional PAUD	Mg.mulyo, Mg.katon, Mg.agung	50	80	130	Terbentuk 7 klp PAUD	APBD Kab	DIKNAS	20.000.000
14. Bantun Peralatan Wirausaha		4		4	Peralatan wirausaha	APBD Prop	DINSOS	
15. Bantuan Gakin Non Potensial	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	30		30	@ Rp 800.000	APBD Kab	NAKERSOSKB	24.000.000
16. Bantuan Lanjut Usia Rentan Ekonomi	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	17		17	@ Rp 150.000	APBD Kab	NAKERSOSKB	2.550.000
17. Bantuan Orang Cacat	Margodadi	1		1	Alat menjahit	APBD Prop	DINSOS	
18. Bantuan Kelompok Desa Prima	Margomulyo	15	56	71		APBD Prop	BPPM	37.500.000
19. Bantuan Alat Kontrasepsi	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	256		256	Akseptor KB	APBN	BKKBN	
20. JAMKESSOS	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	6761		6761	6761 kartu	APBD Prop	DINKES	

21. Bantuan Sembako	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	200		200	Sembako	APBD Kab	UPK Kec	4.000.000
22. Bantuan Hewan Ternak	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	49		49	49 kambing	APBD Kab	UPK Kec	
23. Bantuan Susu Anak SD	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	150		150	Susu	APBD Kab	UPK Kec	2.000.000
		12919	136	13055				976.382.000
24. Kartu Keluarga Miskin	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	4385		4385	4385 kartu	APBD Kab	NAKERSOSKB	
25. Bantuan Rehab Rumah	Margodadi	27		27	27 rumah	APBN, APBD Kab	BKM Swadaya	26.950.000
26. Bantuan Jambanisasi	Margodadi	120		120	120 rumah	APBN, APBD Kab	BKM Swadaya	134.750.000
27. Bantuan Jambanisasi	Margokaton,Margoagung	9		9	9 rumah	APBD Kab	DINKES	5.000.000
28. Bantuan social penderita cacat berat	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	10		10	@ Rp 300.000	APBN	NAKERSOSKB	36.000.000
29. Jaminan sosial lanjut usia	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	20		20	@ Rp 300.000	APBN	NAKERSOSKB	72.000.000
30. Jaminan Pendidikan	SMA N. SMK N, SMK MAARIF, SMK 17	141		141	@ Rp 1.800.000	APBD Kab	DIKNAS	253.800.000
31. Bantuan Rehab Rumah	Margoluwih	8		8			BKM Swadaya	16.000.000
32. Pendataan Kelompok Usaha Masyarakat	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	1855	2500	4355		APBD Kab	TPK Kec	500.000
33. Validasi Data Keluarga Miskin	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	4310		4310		APBD Kab	Bidang KB	3.500.000

	34. Bantuan Sumur Resapan	Margomulyo	172	43	215	Sumur resapan	APBN, APBD Kab	BKM Swadaya	52.487.000
	35. Bantuan Lantainisasi	Margomulyo	4		4	Rumah sehat	APBN, APBD Kab	BKM Swadaya	9.580.000
	36. Bantuan perbaikan sarana air bersih	Margomulyo	56		56	Sarana air bersih	APBN, APBD Kab	BKM Swadaya	47.149.0000
			36955	2815	39770				2.610.480.000
<b>B</b>	<b>Klautser 2</b>								
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>								
	1. Bantuan Modal Usaha 9 Kelompok Usaha Masyarakat	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	125	175	300	Aneka usaha pertanian, peternakan, jasa	APBD Prop	BAG EKONOI	72.500.000
	2. Bantuan modal Usaha Simpan Pinjam	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	524	616	1140	Aneka usaha	APBD Prop	BAG EKONOMI	220.000.000
	3. Pembinaan dan Penanaman Budaya Kerja	Margodadi dan Margoagung	150	650	800	Pentas kesenian tradisional	APBD Kab	DISBUDPAR	
	4. Diklat Menjahit	Margomulyo, Margokaton	8		8	Usaha menjahit	APBD Prop	DINSOS	
	5. Diklat Menjahit	Margokaton	15		15	15 mesin jahit	APBD Kab	BLK	
	6. Diklat Tata Rias	Margoagung	8	8	16	Usaha tat rias	APBD Kab	BLK	
	7. Diklat Tukang Kayu	Margokaton	10	6	16	Usaha tukang kayu	APBD Kab	BLK	
	8. Kursus Peternakan	Mg.dadi,Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	50	100	150	Usaha peternakan	APBD Kab	PERTAHANAN	
	9. Kursus Menjahit	Margokaton	15		15	Usaha menjahit	APBD Prop	SKB, PKK	
			905	1555	2460				292.500.000
	10. Kursus Keaksaraan	Margokaton, Margogung	30		30	30 mesin	APBD Prop	SKB, PKK	

Fungsional					jahit			
11. Kursus Pembuatan Kompos	Margokaton	30		30	Usaha kompos	APBD Kab	PERTAHANAN	
12. Kursus Hantaran dan asesoris	Mg.dadi, Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	20	35	55	Usaha hantaran	APBD Kab	SKB, PKK	
13. Penyuluhan KADRKUM	Margokaton	35	56	91		APBD Kab	BAG HUKUM	1.000.000
14. Penyuluhan KDRT	Margokaton	15	20	35		APBD Kab	BAG KESRA	1.000.000
15. Penyuluhan PHBS	Mg.dadi, Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	45	55	100		APBD Kab	DINKES	1.000.000
16. Penyuluhan KB-KS	Mg.dadi, Mg.luwih, Mg.mulyo, Mg.agung, Mg.katon	55	40	95		APBD Kab	BIDANG KB	1.000.000
17. Pengolahan hasil pertanian dan packing	Margoagung, Margoluwh	25	15	40	3 kelompok IRT	APBD Kab	P2KPM	
18. Bantuan Modal Usaha Simpan Pinjam	Margodadi	35		35		APBN, APBD Kab	BKM, Desa	7.950.000
19. Pelatihan Pemijahan Gurami	Margodadi	20	5	25		APBN, APBD Kab	BKM, Desa	3.850.000
20. Bantuan Induk ayam		49		49	@ 3 induk ayam	APBN, APBD Kab	BKM, Desa	1.000.000
21. Kursus Pengolahan Makanan	Margokaton	40		40	Susu kedelai, abon ikan	APBD Kab	BLK	
22. Bantuan Modal Usaha Ketahanan Pangan	Margokaton	54	15	69	Usaha pertanian	APBD Prop	PERTANIAN	40.000.000

23. Pelatihan Pengolahan Makanan	Margoluwih	10	10	20		Yayasan, swadaya	Harapan insane	
24. Pelatihan Pengolahan Bumbu	Margoluwih	8	12	20	Anyaman bambu	Yayasan, swadaya	Kerabat desa kota	
25. Pelatihan pembuatan Pupuk	Margoluwih	25	35	60	Nutrisi pertanian	Yayasan, swadaya	Kerabat desa kota	
26. Pelatihan Perbengkelan	Margoluwih	2		2		APBD Prop	DINSOS	
27. Pelatihan Pengolahan Makanan	Margoluwih	10		10	Olahan makanan	APBD Kab	BLK	
28. Pelatihan Pengolahan Makanan	Margomulyo	8	10	18	Emping	Yayasan, swadaya	Kerabat desa kota	
29. Pelatihan Pengolahan Bumbu	Margomulyo	15	20	35	Anyaman bambu	Yayasan, swadaya	Kerabat desa kota	
30. Pelatihan Pengolaha Makanan	Margodadi	15	20	35	Abon ikan tawar	Yayasan, swadaya	Kerabat desa kota	
	<b>Sub Total</b>	<b>2356</b>	<b>3458</b>	<b>5814</b>				<b>641.800.000</b>
	<b>Total</b>	<b>39311</b>	<b>6273</b>	<b>45584</b>				<b>3.252.280.000</b>

Sumber data: Pemerintah Kecamatan Seyegan tahun 2009

### **3. Ewektifitas Program**

Program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Desa Margoluwih, dapat membantu masyarakat dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang mereka miliki dan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat dapat melatih masyarakat untuk mengembangkan diri tentunya dengan didukung pendamping-pendamping yang mumpuni agar proses pelaksanaan program lebih ewektif. Program-program pemberdayaan masyarakat dinilai lebih ewektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Sleman, karena program ini lebih bersifat mendidik dan masyarakat miskin jadi tidak terlalu bergantung kepada Pemerintah untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang bersifat sementara seperti peberian bantuan BLT yang dilaksanakan Pemerintah Pusat. Inilah yang menjadi pusat pemikiran Pemerintah Kabupaten Sleman, bagaimana masyarakat bisa terlepas dari kemiskinan dengan cara meberdayakan diri mereka sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SKPD) Kabupaten Sleman.

Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan di Desa Margoluwih tidak membawa dampak yang mencolok, karena program yang di berikan lebih terpusat pada klaster pertama yaitu bantuan dan perlindungan sosial. Ini menyebabkan terjadinya perubahan paradigma masyarakat bahwa jadi warga miskin mendapatkan jaminan hidup dari

... di klaster kedua hanya untuk

masuk kedalam klaster pertama, sehingga masyarakat yang awalnya tergolong masyarakat tidak miskin menjadi masyarakat miskin.

Kurangnya prosentase pogram yang dilakukan pada klaster ke dua dan ketiga menyebabkan program-program yang di buat tidak mampu memperlihatkan hasil yang baik, seharusnya program-program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil lebih di optimalkan, karena jika proporsi yang di berikan dalam pemberdayaan lebih banyak, maka masyarakat nantinya secara perlahan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat-masyarakat yang termasuk dalam kategori sangat miskin dapat di rekrut untuk ikut dalam pengembangan usaha mereka.

**Tabel 3.6**

**Rekapitulasi Terakhir Hasil Validasi KK Miskian Tahun 2008 Sampai Tahun 2010 Kecamatan Seyegan**

No	Desa	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		KK	Jiwa	KK	jiwa	KK	Jiwa
1	Margoluwih	729	2437	734	2268	747	2367
2	Margodadi	886	2836	769	2182	733	2225
3	Margomulyo	1399	4148	1221	3640	1123	3493
4	Margoagung	1149	3769	1156	3421	1014	3212
5	Margokaton	650	1880	492	1522	423	1459
	<b>Jumlah</b>	<b>4813</b>	<b>15070</b>	<b>4027</b>	<b>13033</b>	<b>4027</b>	<b>12756</b>

Berdasarkan data di atas, jumlah warga miskin di Desa Margoluwih dari tahun 2009 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu 2.268 menjadi 2.367 jiwa, ini menandakan bahwa pelaksanaan program-program dalam pilot project penanggulangan kemiskinan belum berjalan sesuai harapan, dan bantuan yang diberikan terkesan hanya bersifat sementara.

Semakin meningkatnya jumlah warga miskin terjadi karena mental masyarakat yang perlu di ubah, contohnya dengan adanya Jamkesmas, gakin dan sebagainya banyak masyarakat yang datang menemui lurah mengurus surat miskin untuk mengurus jaminan-jaminan yang diberikan Pemerintah kepada warga miskin padahal mereka tidak tergolong warga miskin, dan pola pikir seperti ini menyulitkan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya mengentaskan kemiskinan, nah selama mental masyarakat masih seperti itu tentunya susah menentukan keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman karena mental masyarakat yang ingin dimiskinkan sehingga memperoleh jaminan yang seharusnya bukan milik mereka.<sup>47</sup>

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya KB juga menjadi penyebab kenapa jumlah penduduk miskin di Desa Margoluwih terus bertambah, disinilah seharusnya peran Dinas NAKERSOS KB di optimalkan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan KB. Oleh karena itu, program-program yang di buat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan bisa di bilang belum berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Margoluwih.

### **C. Variable Yang Berperan Dalam Pilot Project Penanggulangan**

#### **Kemiskinan**

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut Edward III, implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel inilah yang paling menentukan keberhasilan suatu program.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih, komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi tidak dilakukan dengan baik oleh pelaksana program maupun pembuat kebijakan, sehingga banyak terjadi kendala yang harus dihadapi pelaksana program dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih.

#### **a. Komunikasi**

Faktor komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan satu program organisasi, termasuk implementasi program Pemerintahan. Dalam komunikasi Pemerintahan yang menjadi komunikator adalah aparat Pemerintahan sebagai implementor kebijakan. Yang menjadi komunikan adalah penerima atau tujuan dari kebijakan program Pemerintah, dalam hal ini adalah masyarakat. Yang dikomunikasikan adalah isi dari program kerja Pemerintahan bagi masyarakat,

Faktor komunikasi menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan. Isi kebijakan mengenai program penanggulangan kemiskinan tidak ditransfer dengan baik kepada person baik aparat pelaksana maupun kepada masyarakat penerima bantuan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan kurang dipahami oleh aparat, sehingga pelaksanaannya tidak konsisten dan kurang akurat dalam mengimplementasikannya.

Dari hasil observasi, proses sosialisasi memang sudah dilakukan aparat Pemerintah tetapi bukan kepada masyarakat. Sosialisasi itu hanya dilakukan kepada aparat di Kecamatan Sosialisasi kepada aparat pun hanya dilakukan sekali saja. Kalau yang disosialisasikan itu hanya kepada aparat pelaksana, dan aparat itu sendiri tidak memahami isi kebijakan system oprasional pelaksanaan program maka komunikasi kepada masyarakat mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan baik.

Selain itu, komunikasi yang di terapkan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan hanyalah melalui system atasan ke bawahan, jadi TKPKD tidak pernah berkomunikasi dengan msayarakat Seyegan, namun hanya berkomunikasi dengan TPK Kecamatan sehingga kurang adanya control yang terjadi dari TKPKD dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan di Desa Margoluwih.

Kurangnya komunikasi yang di jalin antara dinas-dinas pendukung dengan pelaksana program penanggulangan kemiskinan di kecamatan seyegan menunjukkan bahwa kebijakan yang di buat tidak berjalan sesuai rencana dalam pelaksanaan program.

Seharusnya dinas-dinas pendukung dalam program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan berkoordinasi dengan TPK Kecamatan agar TPK dapat memberi masukan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Contohnya pemberian pupuk yang diberikan kepada petani, seharusnya Dinas Pertanian berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar mendapat masukan-masukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan, karena pihak Kecamatan lebih memahami para petani, jadi tidak akan terjadi salah sasaran. Meskipun masing-masing PPL sudah mereka sebar di Desa Margoluwih, namun PPL yang ada juga tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, sehingga TPK Kecamatan tidak dapat bekerja dengan optimal dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih karena tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas pendukung.<sup>48</sup>

Apabila nara sumber dari pihak Pemerintah tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan penerima informasi karena jarak maupun waktu atau penyebab lain, maka diperlukan unsur berikutnya yaitu saluran (medium) atau disebut juga channel, yang dapat berupa media cetak atau media elektronik, yang masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Media ini sangat efektif, karena umumnya masyarakat menggunakan media ini setiap hari seperti koran, radio.

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam peristiwa komunikasi adalah umpan balik (feed back), atau respon/tanggapan dari pihak penerima terhadap pesan atau informasi yang diperolehnya dari sumber. Dari umpan balik/respon/tanggapan dari masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah dalam hal ini kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan sebagai sumber informasi dan mengetahui sejauh mana pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti atau dipahami dengan tepat oleh masyarakat, sesuai dengan apa yang diinginkan dan bagaimana reaksi penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh Pemerintah.

Dalam hal ini media yang di gunakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam berkomunikasi dengan masyarakat tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan hanyalah melalui media elektronik yaitu melalui websaid-webasaid resmi Pemerintah Kabupaten Sleman dan melalui media massa cetak (Koran). Dari sini terlihat jelas bahwa komunikasi yang di sampaikan tidaklah efektif, karena kita ketahui bahwa masyarakat miskin di Kecamatan Seyegan tidak pernah menyentuh media seperti Koran dan internet, mereka juga tidak merngerti akan kemajuan teknologi karna faktor pendidikan mereka. Yang mereka tahu hanyalah bertani dan mencari rumput, sehingga penyampaian komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui websaid dan Koran hanyalah sia-sia, dan masyarakat lebih cenderung pasif dalam merespon apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah tentang pelaksanaan

Tidak terjalinnya koordinasi yang baik antara pelaksana program dengan dinas-dinas pendukung menambah daftar panjang akan ketidak siapan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat, karena dari hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa dinas-dinas pendukung tidak pernah berkoordinasi dengan para aparat pelaksana program, sehingga tidak terjalin sebuah kominikasi yang baik antar pelaksana program dengan instansi-instansi pendukung dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan.

Jika komunikasi tidak dilakukan antara dinas-dinas pendukung dengan aparat pelaksana program maka nantinya akan terjadi ketidak jelasan pertanggung jawaban mengenai kucuran dana yang di keluarkan dalam pelaksanaan program, dan akan semakin di pusingkan dengan penyampaian pesan yang selalu berubah-ubah antara pelaksana program dengan dinas-dinas pendukung pelaksana program karena tidak adanya komunikasi yang dilakukan antara dinas-dinas pendukung dengan aparat pelaksana program.

Belum efektifnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan ,salah satu faktornya adalah kurang baik pola manajemen kepemimpinan dalam menerapkan kebijakan yang diputuskan untuk sungguh sesuai dengan penrapannya di lapangan. Dalam konteks hubungan personal, hubungan struktural antara antasan dan bawahan belum menunjukkan fungsi koordinasi yang baik. Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan dari

dalam koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja, tetapi harus dikendalikan. Oleh karena itu personal harus diperhatikan pekerjaannya dan akan merasa senang bila mendapat penghargaan dari hasil kerjanya, sebab kalau terjadi kekeliruan biasanya yang selalu disalahkan adalah bawahannya, padahal seharusnya adalah tanggung jawab pimpinan, yang antara lain karena kurang mengadakan koordinasi.

Apabila melihat dari pentingnya koordinasi berarti tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa penerapan koordinasi di dalam suatu organisasi memang mutlak dilaksanakan. Penerapan koordinasi bagi setiap organisasi mempunyai manfaat yang besar, apabila organisasi yang kompleks atau multi fungsi seperti halnya organisasi (Pemerintah Daerah) justru koordinasi sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan agar lembaga atau Dinas Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah terdapat keselarasan dan kesamaan tindakan dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya, dengan dilaksanakan koordinasi berarti sasaran dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai lebih efektif dan efisien.

Hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan koordinasi adalah pada saat perumusan kebijaksanaan koordinasi harus sudah dimulai. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau satuan kerja mana yang secara fungsional berwenang dan bertanggungjawab atas suatu masalah. Pejabat atau instansi mana yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab mengenai suatu masalah berkewajiban memprakarsai dan mengkoordinasikan. Perlu dirumuskan secara jelas wewenang, tanggungjawab dan tugas-tugas satuan kerja. Perlu dirumuskan program kerja organisasi secara jelas yang memperlihatkan keserasian kegiatan diantara satuan-satuan kerja. Perlu ditetapkan

komunikasi timbal balik untuk menciptakan satuan bahasan dan kerja sama.<sup>49</sup>

Pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan kekuasaan tidak selamanya secara sepihak melakukan apa saja tanpa kerja sama dengan pihak lain dalam hal ini dengan aparat sendiri sebagai implementor kebijakan, dengan masyarakat sebagai penentu keberhasilan berbagai kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu, faktor komunikasi sangat penting diperhatikan dalam menentukan kebijakan. Kebijakan itu akan berdaya guna jika dapat disosialisasikan dengan tepat kepada implementor kebijakan untuk sampai kepada masyarakat. Oleh karena itu fungsi koordinasi harus dijalankan secara tepat guna keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dengan kata lain, hubungan pemerintahan dengan masyarakat, dan dengan pihak swasta membangun hubungan good governance. Dari, fakta, data dan teori mengenai komunikasi dalam upaya mensosialisasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan haruslah dilakukan secara langsung (tatap muka) agar penyampaian komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dapat dipahami oleh aparat pelaksana dan masyarakat agar nantinya masyarakat memberi respon dan feedback yang baik untuk proses pelaksanaan program selanjutnya. Faktor utama mengenai buruknya komunikasi

---

<sup>49</sup> ... .. (KEMAS) Kabupaten Sleman, Depok, Tj

yang dilakukan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana program adalah isi kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat Seyegan dari jurang kemiskinan belum dipahami aparat pelaksana program, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan selalu menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

### **1) Transmisi Komunikasi**

Banyaknya rintangan dalam menjalankan sebuah program atau kebijakan terletak pada jalur transmisi komunikasi pada proses implementasi kebijakan, keputusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan belum ditransmisikan secara tepat dan jelas dari pembuat kebijakan kepada personalia yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi belum berjalan efektif tidak hanya antara pembuat kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan aparat pelaksana, ini disebabkan karena sistem penyampaian yang sifatnya atasan dan bawahan, tetapi terlebih antara aparat pelaksana program dengan masyarakat sebagai penerima bantuan.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, faktor penghambat dalam transmisi komunikasi adalah:

- Banyaknya persyaratan yang harus dilalui masyarakat dalam memperoleh

- Banyaknya jenjang yang harus dilalui masyarakat dalam proses pendataan warga miskin
- Komunikasi yang disampaikan komunikator jelas tetapi pendidikan masyarakat Desa Margoluwih rendah sehingga terjadi salah pengertian/miskomunikasi.
- Pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator masih tidak sesuai atau tidak konsisten.

## 2) Kejelasan

Faktor-faktor yang mendorong ketidak jelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan. Faktor penghambat tersebut dalam implementasi pilot project penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih dikarenakan sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara program sulit dipahami oleh masyarakat karena faktor pendidikan masyarakat sehingga bahasa-bahasa yang digunakan oleh pihak pelaksana program dalam melakukan

. . . . .

### **3. Konsistensi**

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Faktor yang menghambat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih adalah kurangnya konsistensi yang ditunjukkan Pemerintah dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan, karena perintah yang diberikan oleh pihak pelaksana program selalu berubah-ubah sehingga masyarakat Desa Margoluwih kesulitan dalam menangkap apa yang harus mereka lakukan dalam melaksanakan program. Karena tidak konsistennya sikap yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana menyebabkan pelaksanaan program yang telah direncanakan menjadi tidak teratur dan menimbulkan kebingungan pada masyarakat mengenai system pelaksanaan yang harus mereka lakukan karena perintah yang diberikan selalu berubah-ubah.

#### **b. Sumber Daya**

Sumberdaya aparat dalam organisasi Pemerintahan baik menyangkut sistem, struktur, maupun konteks pusat maupun daerah sangat ditentukan oleh

1. Kualitas aparat yang ada. Kualitas dapat ditentukan oleh pendidikan, pengalaman

pelatihan aparat sesuai bidang tugas dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Kemampuan aparat Pemerintah akan menjanjikan kekuatan-kekuatan dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Implementasi kebijakan akan efektif, jika didukung oleh sumberdaya para implementatornya. Jika implementornya kekurangan sumberdaya, implementasi akan mungkin menjadi tidak efektif. Sumberdaya penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumberdaya meliputi staf dengan jumlah yang cukup dan dengan keterampilan yang tepat untuk menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan peneliti, diperoleh data lapangan bahwa dominasi atau mayoritas aparat belum didukung oleh sumberdaya yang memadai. Pegawai sangat minim, baik dari segi kualifikasi, kompetensi, pengalaman maupun dari aspek tingkat pendidikan. Secara umum, tidak dapat banyak diharapkan menyangkut tuntutan efektivitas kinerja aparat, bila output pendidikan aparatnya rendah berdasarkan kualifikasi pendidikan. Hal yang lebih memprihatinkan adalah dari jumlah pegawai yang minim baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi relawan dalam pelaksanaan program sehingga sulit untuk

**Tabel 3.7****Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>	<b>Pendidikan</b>
1	Anggoro Aji Sunaryono, SH	Camat	Penanggung Jawab	S1
2	Sudarjo, BA	Tokoh masyarakat	Ketua	D3
3	Tri Akmeriyadi	Kasi kesmas kecamatan	Pembantu Pelaksana Teknis	S1
4	Antoni Swasti, SH	Kasi PP	Pembantu Pelaksana Teknis	S1
5	Sugeng Prihandoro	Tokoh Pemuda	Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan	SMA
6	Muryanta	Kepala UPK	koordinator Pelaksana Teknis	SMA
7	Jumarko	Tokoh Masyarakat	koordinator Pelaksana Teknis	SMA
8	Slamet	Tokoh Masyarakat	koordinator Pelaksana Teknis	SMA
9	Sukismo	Staf Kesmas Kecamatan	Staf Administrasi	SMA

*Sumber data: Pemerintah Kecamatan Seyegan*

Data di atas, menunjukkan bahwa sumberdaya aparat pelaksana belum merata baik dari tingkat pendidikan maupun kemampuan dalam melaksanakan system oprasional program yang harus di laksanakan dalam program penanggulangan kemiskinan. Dari jumlah aparat pelaksana yang ada, didominasi oleh yang berpendidikan SLTA. Nampak, bahwa persoalan kompetensi, skill dan tanggung jawab aparat sebagai implementor kebijakan penanggulangan

Sulitnya mencari person yang pas dikarenakan pilot project penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan ini hanya menjadi proyek sampingan dan tidak pokok sehingga timbul rasa ketidakseriusan yang dilakukan oleh anggota pelaksana sehingga TPK Kecamatan Seyegan hanya mencari person yang benar-benar memiliki kemauan yang tinggi dalam melaksanakan program ini meskipun kemampuan yang dimiliki tidak memadai, oleh karena itu dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan sering terjadi perubahan anggota pelaksana program.<sup>50</sup>

Pemahaman aparat pelaksana di atas menunjukkan bahwa melaksanakan tugas jika tidak dengan hati maka tugas yang dilaksanakan akan semakin amburadul. Paradigma seperti ini menunjukkan bahwa person-person dalam Pemerintahan tidak melaksanakan tugas dengan serius. Dan pergantian personil yang tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dengan tugas yang harus dilaksanakan mengakibatkan kinerja aparat pelaksana semakin tidak maksimal.

Dengan demikian, belum efektifnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan aparat dalam menjalankan tugas. Kenyataan ini nampak jelas dari berbagai masalah yang diakibatkan oleh kinerja aparat Pemerintah yang tidak optimal. Tidak memadainya kualitas aparat Pemerintahan, juga diakui oleh masyarakat. Dikatakan bahwa kebanyakan yang bertugas adalah aparat yang tidak memiliki keterampilan dan pengalaman. Para petugas di lapangan hanya menjalankan tugas karena terdesak oleh perintah atasan, bukan terdorong untuk

berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kurang matangnya perencanaan sumberdaya aparat yang dilakukan mengakibatkan kinerja aparat tidak sesuai harapan.

### **1) Staf (Pegawai)**

Kurangnya dukungan staf yang kompeten di bidangnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Margoluwih memicu persoalan yang rumit bagi tim penanggulangan kemiskinan Kecamatan Seyegan karena sebuah program jika tidak di dukung dengan staf yang kompeten dibidangnya maka program-program yang dilaksanakan tidak akan berjalan sesuai dengan koridor yang telah di tentukan dan ini memicu terjadinya sebuah ketidak jelasan hasil yang akan di capai dengan dilaksanakannya program ini.

Kemudian terjadinya konflik kepentingan yang terjadi diantara aktor pelaksana program penanggulangan kemiskinan menambah daftar buruk permasalahan yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaannya hanya beberapa anggota saja yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih. Selain itu dengan sering terjadinya pergantian person dalam TPK Kecamatan menandakan ketidak acuhan aparat pelaksana program, ini membuat pelaksanaan program penanggulangan

## **2) Informasi**

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk; Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana harus melakukannya. Dengan demikian para pelaksana diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan Pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang ataukah tidak.

Menurut hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa kurangnya pemahaman tugas yang akan dilaksanakan oleh aparat pelaksana program menjadi kendala tersendiri sehingga pelaksana program selalu kesulitan dalam melakukan sosialisasi program kepada masyarakat Desa Margoluwih. Hal ini disebabkan karena person yang ada tidak memiliki kompetensi yang baik hingga aktor-aktor pelaksana program yang ada sulit untuk memahami mekanisme-mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan program, sehingga informasi yang disampaikan aparat pelaksana program selalu berubah-ubah.

## **3) Wewenang**

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat

para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Namun dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih, wewenang yang diberikan memberikan peranan yang sangat baik dan menjadi pendukung pelaksana program karena wewenang yang di berikan kepada aparat pelaksana kebijakan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pelaksana program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih.

#### **4) Fasilitas**

Fasilitas fisik mungkin pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar



Hal ini terjadi karena adanya gap antara formulasi isi kebijakan dengan isi kebijakan yang akan diimplementasikan. Terjadi kesenjangan antara pihak yang merumuskan kebijakan di satu pihak, yang kurang menyentuh realitas masyarakat serta persoalannya dengan pihak aparat pelaksana kebijakan. Isi kebijakan yang diformulasikan sering bertentangan dengan persoalan yang dihadapi aparat pelaksanaan program. Disposisi/kecenderungan sikap dan perilaku aparat dikaitkan dengan kurangnya dukungan aparat yang menjadi implementor dalam mendukung implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, hal ini berkaitan dengan rendahnya komitmen aparat dalam menjalankan tugasnya.

Kecenderungan sikap aparat pelaksana yang tidak bekerja sesuai kemampuan yang mereka miliki tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan. Aparat pelaksana harus di kejar-kejar dan di beri arahan sehingga mereka bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan. Hal-hal semacam ini jika terus di pertahankan maka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan akan sia-sia, oleh karena itu saat memutuskan akan membuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberi arahan dan penyadaran kepada aparat pelaksana program akan tugas yang akan mereka laksanakan, sehingga nantinya aparat pelaksan benar-benar bekerja dengan serius dan memiliki kompetensi yang baik, karena dengan sering di

yang mereka miliki seperti yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Seyegan, sehingga dalam pelaksanaannya program-program yang dilaksanakan selalu menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa tidak berjalan dengan baik. Dalam arti kata kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pejabat pelaksana dengan anggota-anggotanya.

Ketua-ketua yang di bentuk dalam TPK Kecamatan seyegan tidak berperan aktif dalam program ini, karena mereka menganggap program ini adalah program sampingan dan tidak pokok, sehingga ada kecenderungan dari mereka untuk tidak serius dalam melaksanakan pilot project ini. Selain itu anggota-anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Selalu berubah-ubah karena ada person yang loyal tapi kemampuannya terbatas namun ada juga person yang memiliki kemampuan baik tapi kurang total dalam bekerja sehingga tim selalu di ubah-ubah untuk mencari orang yang bisa di ajak kerja.<sup>51</sup>

Dari sini dapat terlihat jelas bahwa masing-masing Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan tidak berkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi keselarasan antara harapan dengan kenyataan di lapangan dengan di bentuknya masing-masing Tim penanggulangan kemiskinan di Kecamatan maupun Desa.

Selain itu menurut informan, ketua dalam tim penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan tidak bekerja sesuai harapan, ketua hanya di pilih tapi tidak melakukan tugas yang seharusnya dilakukan, bahkan dalam hal pelaksanaan ketua tim tidak mampu berbuat banyak sehingga pihak yang seharusnya bertugas sebagai pembantu pelaksana, merangkap dan mengorganisir aparat-aparat pelaksana program. Hal-hal semacam ini tentunya akan semakin menambah permasalahan dalam pelaksanaan program, oleh karena itu kemampuan sumberdaya manusia dalam melaksanakan sebuah program sangatlah berpengaruh dengan sikap dan mental para aparat pelaksana program sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pembuat kebijakan haruslah lebih selektif dalam menentukan aparat pelaksana program.

### **1) Pengangkatan Birokrasi**

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan-hambatan yang ada di netralsisir

kemampuan yang dimiliki sangat minim, kemudian dalam pelaksanaannya person yang dipilih memiliki kedekatan dengan anggota masyarakat Desa Margoluwih seperti tokoh-tokoh masyarakat, dukuh dan lain sebagainya. Dengan cara ini tentunya dapat menambah nilai dalam peningkatan kinerja aparat pelaksana program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi jarak antara pelaksana program dengan masyarakat Desa Margoluwih, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan dapat terlaksana sesuai prosedur.

## **2) Insentif**

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Faktor-faktor pendukung yang berperan dalam pelaksanaan program di Desa Margoluwih adalah sebagai berikut:

- Dilakukannya manipulasi insentif agar meningkatkan kinerja para aparat pelaksan program karena pelaksana program (TPK) yang telah di buat beranggapan bahwa pilot project penanggulangan kemiskinan ini bukan pekerjaan pokok, dan dengan dilakukannya manipulasi insentif tentunya dapat mengubah pola fikir mereka dan menambah motifasi dalam melaksanakan program.
- Dengan dilakukannya manipulasi insentif tidak membuat persaingan antara aparat pelaksana program.
- Dengan di berikannya insentif, kepentingan pribadi para pelaksana program dapat terpenuhi meskipun insentif yang di berikan tidak terlalu besar.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Disposisi atau komitmen aparat sebagai implementor kebijakan program Pemerintahan belum cukup apabila aparat Pemerintah tidak berada dalam satu sistem dan mekanisme struktur organisasi Pemerintahan. Struktur itu penting untuk membedakan mana yang menjadi atasan dan mana yang menjadi bawahan atau aparat umumnya. Oleh karena itu, disposisi atau komitmen aparat mengandalkan keteraturan hubungan kerja dalam struktur organisasi Pemerintahan.

Dari hasil penelitian di dapat aliran struktur birokrasi pada pelaksanaan program penanggulangan di Kecamatan Seyegan yaitu Camat sebagai

penanggung jawab sementara ketua pelaksana di pegang oleh masyarakat di luar pegawai Kecamatan yaitu tokoh masyarakat. Ini akan membawa dampak buruk karena seharusnya ketua yang di tunjuk harus berasal dari pegawai Kecamatan yang memiliki kompetensi yang baik dalam menyikapi masalah-masalah yang ada saat proses pelaksanaan program, jika ketua yang diharapkan sebagai pemegang kendali tidak memiliki kompetensi yang baik maka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan tidak akan berhasil.

Berdasarkan fakta terlihat jelas bahwa yang selalu memberi komando kepada aparat pelaksana di lapangan adalah pembantu pelaksana teknis yang berasal dari pegawai Kecamatan yaitu Kasi Kesmas Kecamatan Seyegan. Peran ketua tim sangatlah penting karena komando yang di berikan harus sesuai dengan rencana program yang telah di tetapkan, jadi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan, strukur birokrasi yang ada belum terorganisir dengan baik. Yang menjadi akibatnya adalah adanya miskomunikasi antara atasan dengan bawahan dalam menghadapi persoalan lapangan. Para implementor kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan, para implementor juga memiliki keinginan serta didukung sumberdaya yang cukup untuk melakukan program kebijakan yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya sering para implementor mendapat kendala dalam implementasi

Dalam pelaksanaannya struktur birokrasi yang di buat tidak dilaksanakan berdasarka ketugasan-ketugasan dan wewenang yang telah di berikan berdasarkan SK Camat Seyegan, ini menandakan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seyegan hanyalah formalitas belaka, dan hasilnya pelaksanaan program-program yang telah di rencanakan menjadi tidak terkendali karena ketua tim pelaksana program tidak bekerja sesuai dengan posisi yang di tetapkan dikarenakan kompetensi yang minim.

Oleh karena itu seharusnya ketua tim sebagai komando pelaksana program seharusnya di pilih dari anggota Kecamatan kerena memiliki kemampuan yang memadai, selain itu Kecamatan lebih sering berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten akan hal pelaksanaan-pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, dan ketugasan-ketugasan yang di berikan haruslah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparat pelaksana.

### **1) Standard Operational Procedure (SOP)**

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya ( Standard Operating Procedures, SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya, mereka mengandalkan pada

prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada. Namun demikian, prosedur-prosedur biasa yang dirumuskan.

Adanya standar operasional prosedur yang di buat oleh pembuat program (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dapat mengontrol para pelaksana program dan mereka mampu bertanggung jawab dengan baik meskipun tidak adanya bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh TPK Desa akan anggaran-anggaran yang telah di berikan dalam pelaksanaan program sehingga tidak adanya transparansi data yang dilakukan.

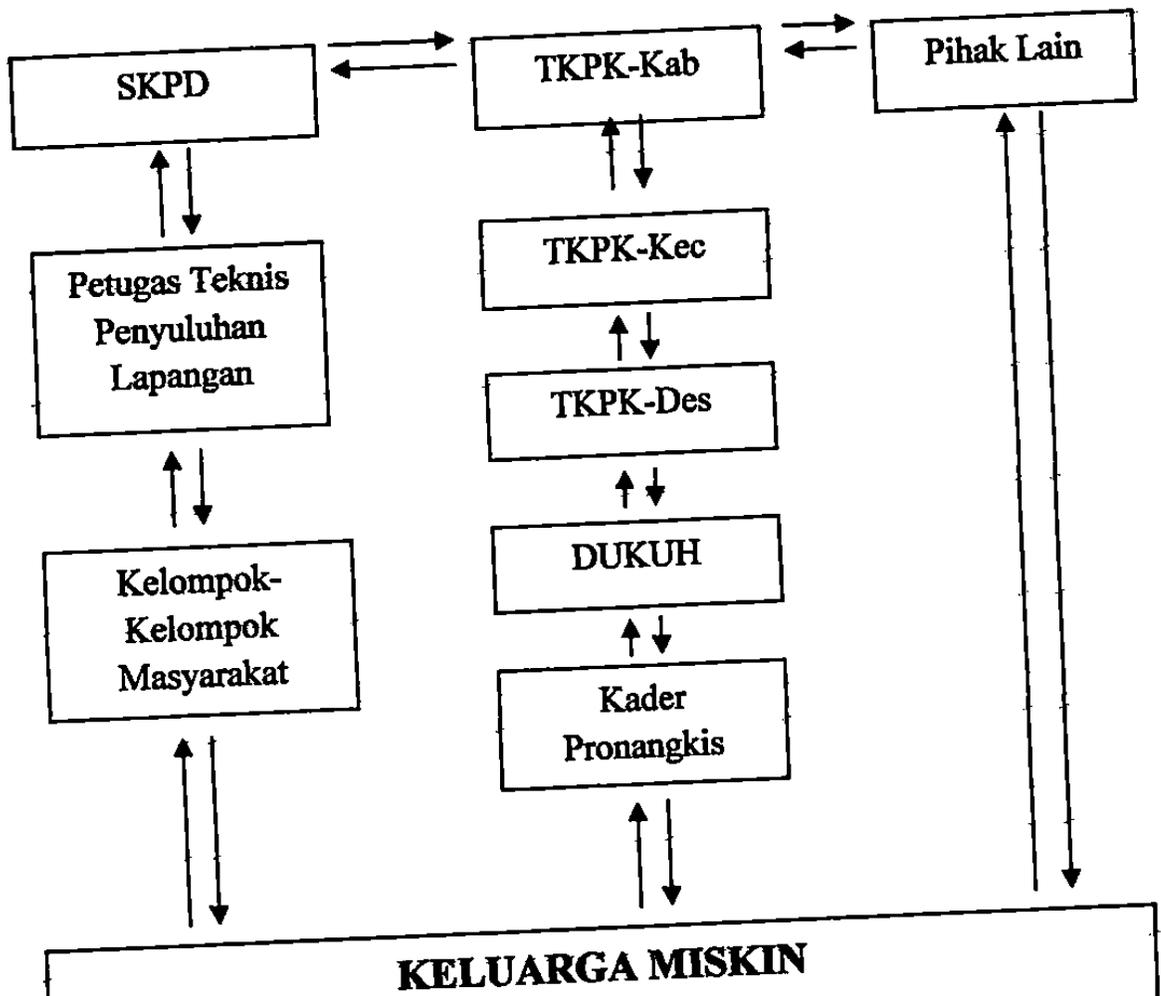
Meskipun standar operasional di buat, namun dalam pelaksanaannya alur-alur yang digambarkan dalam mekanisme pelaksana program tidak berjalan sesuai rencana, terutama pada tingkat Desa. Karena pada saat memasuki tingkat Desa, tim penanggulangan Desa ternyata tidak di buat, yang ada hanyalah para pegawai Desa yang di tunjuk dalam pendampingan-pendampingan pelaksana program sehingga alur pertanggung jawaban dana tidak dapat di pertanyakan karena audit data penyaluran dana yang seharusnya di pertanggung jawabkan oleh ketua TPK Desa menjadi tidak ada karena tim tidak di bentuk di tingkat Desa dan pedukuhan.

Karena tidak di bentuknya TPK Desa tentunya menambah kinerja dan konsentrasi TPK Kecamatan sehingga TPK Kecamatan harus bekerja ekstra dalam melaksanakan program-program di Pedesaan. Faktor yang menyebabkan tidak

anggotanya dalam melaksanakan tugas yang di berikan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih, ini dikarenakan kompetensi yang dimiliki pegawai Pemerintah Besa bisa dikatakan tidak memadai.

**Gambar 3.1**

**Standard Operational procedure Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sleman**



## **2) Fragmentasi**

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Tidak adanya koordinasi yang dilakukan dinas-dinas pendukung dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih menandakan bahwa implementasi program belum berjalan dengan baik, kemudian masing-masing personil TPK memiliki yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk karena anggota yang dipilih dalam pelaksanaan program memiliki tugas pokok lainnya. Selanjutnya Aktor pelaksana program membutuhkan perubahan system kinerja dalam pelaksanaan program agar program-program yang di buat memiliki anggota yang kusus dalam